

# EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN (GEMERLAP) DI DESA SOKO, KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN (2011-2015)

**Noto Mashari Joyo**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

## **ABSTRACT**

*The purpose of this evaluation study is to describe the rating result of the performance attainment of a program initiated by Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan (Gemerlap). This study applies qualitative research method with descriptive research type. The location of this research includes government agencies which are involved in the program performance of Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan (Gemerlap). Those agencies are Development planning agency at sub-National level (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)) Kabupaten Lamongan, agriculture and forestry offices of (Dinas Pertanian dan Kehutanan) Kabupaten Lamongan as an agency assigned as the program executor, with the help of UPTD in agriculture field from the sub-district. Informant stipulation was done with the techniques of purposive sampling and snowball. Whilst data collection technique was done with observation, in-depth interview with the informants, and study of written documents. Subsequently, to ensure the validity of research data, the triangulation technique was used. Hereinafter, the techniques used to analyze the obtained data were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of this study shows that the process of the program implementation of Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan (Gemerlap) was not effective and also inefficient. This can be stated because five indicators of effectiveness show that the program was not performed well and there are two of three efficiency indicators that assert adversity.*

*Keywords: Agriculture, Evaluation, Program, Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap)*

## **Pendahuluan**

Pembangunan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yakni masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan merupakan awal mula proses terbentuknya keterbaruan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Pembangunan meliputi : pembangunan fisik infastruktur, pembangunan lembaga, pembangunan perekonomian, pembangunan karakter dan pembangunan lainnya yang merupakan aspek-aspek untuk mencapai suatu tujuan dan untuk tujuan pengembangan dari aspek tersebut, pembangunan tentu dilakukan dengan melalui beberapa proses yang tentu mengarah pada pembangunan yang semacam apa yang akan

dilakukan, hal ini tentu tidak akan terlepas pada arah kebijakan atau visi dari pemerintah.

Ketepatan dalam pembangunan tentu akan berdampak pada perkembangan wilayah yang dikembangkan.

## **TABEL. I.1**

NO	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Pacitan	172.688	186.386	160.364
2	Kab. Ponorogo	406.678	402.047	420.357
3	Kab. Trenggalek	167.222	182.848	169.560
4	Kab. Tulungagung	299.755	259.581	289.083
5	Kab. Blitar	303.332	289.494	302.958
6	Kab. Kediri	306.175	281.392	286.003
7	Kab. Malang	416.607	464.498	438.116
8	Kab. Lumajang	408.635	387.168	400.617
9	Kab. Jember	968.505	964.001	978.373
10	Kab. Banyuwangi	732.262	706.419	747.808
11	Kab. Bondowoso	317.439	329.557	316.465
12	Kab. Situbondo	266.005	290.954	253.556
13	Kab. Probolinggo	302.572	311.258	292.546
14	Kab. Pasuruan	571.510	624.198	661.321
15	Kab. Sidoarjo	203.573	179.873	202.309
16	Kab. Mojokerto	306.881	316.213	301.178
17	Kab. Jombang	462.628	432.173	431.175
18	Kab. Nganjuk	507.670	406.786	471.760
19	Kab. Madiun	499.679	466.125	520.417
20	Kab. Magetan	288.756	305.327	303.494
21	Kab. Ngawi	708.694	776.937	738.304
22	Kab. Bojonegoro	808.112	806.548	847.857
23	Kab. Tuban	576.738	503.395	537.665
24	Kab. Lamongan	856.890	846.275	959.135
25	Kab. Gresik	386.435	367.902	376.553
26	Kab. Bangkalan	259.861	295.178	312.080
27	Kab. Sampang	245.536	217.955	242.174
28	Kab. Pamekasan	178.801	148.663	152.341
29	Kab. Sumenep	160.365	205.636	189.670
30	Kota. Kediri	9.770	11.153	9.586
31	Kota. Blitar	10.899	9.391	9.464
32	Kota. Malang	12.563	11.285	13.271
33	Kota. Probolinggo	13.178	11.393	14.109
34	Kota. Pasuruan	19.830	15.128	15.732
35	Kota. Mojokerto	6.674	3.768	4.221
36	Kota. Madiun	17.135	16.425	14.325
37	Kota. Surabaya	13.776	11.057	9.448
38	Kota. Batu	4.878	4.409	3.653
JAWA TIMUR		12.198.709	12.049.342	12.397.049

## Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2015

Dari data tabel I.1 peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu dari 10,58 juta ton menjadi 12,20 juta ton atau naik sebesar 15,33 persen, sedangkan kenaikan di tahun 2014 hanya berhasil mencapai 2,89 persen.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang harus terus diberdayakan oleh masyarakat dan pemerintah Lamongan, karena mayoritas penduduk Lamongan adalah petani dan Lamongan terkenal dengan ketahanan pangannya. Hal tersebut tentunya bisa meningkatkan nilai perekonomian yang ada di Kabupaten Lamongan. Artinya peningkatan melalui pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan. Sebagai salah satu unsur dari ketahanan pangan yang mendasari pertanian harus dikembangkan. Namun, peningkatan perekonomian harus dilihat sisi-sisi yang masih menjadi kendala yang sedang dirasakan oleh petani. Kemajuan suatu perekonomian dapat kembali membangkitkan kesejahteraan yang diharapkan menjadi kenyataan. Tidak ada lagi adanya kesetimpangan antara perekonomian perkotaan dengan pedesaan menjadikan pemerataan ekonomi menjadi hal yang utama untuk menjadi sasaran suatu program yang akan dan sedang dilaksanakan.

**Diagram I.1**  
Luas Lahan Menurut Jenis 2014



Sumber : Lamongan Dalam Angka 2015/Lamongan in Figures 2015

Data diagram I.1 menunjukkan bagaimana masih banyaknya lahan yang digunakan untuk pertanian, dengan lahan pertanian sawah seluas 87.762 masih digunakan sebagai pertanian, lahan pertanian non sawah seluas 55.751 dan lahan non pertanian seluas 23.459 yang tidak digunakan sebagai pertanian.

Pembuatan program-program yang ditujukan untuk lebih mensejahterakan dan menambah hasil pertanian tentu merupakan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan membuat program “Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap)”. Program unggulan dari pemerintah dan Bupati Lamongan ini ditujukan untuk lebih meningkatkan hasil usaha masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di Kabupaten Lamongan.

Pelaksanaan program yang dilakukan dengan cara bertahap diberikan kepada setiap desa yang diwakili oleh kelompok tani dipedesaan Kabupaten Lamongan dengan memberikan bantuan handtraktor dan pompa memang sangat diperlukan oleh petani, harapannya diberikannya pompa dan handtraktor tentunya bertujuan untuk mempermudah kerja petani dan membantu petani agar panen yang dihasilkan terus bertambah. Secara tidak langsung keinginan pemerintah Lamongan untuk terus menghgencarkan pendapatan perkenonomian di sektor pertanian harus terus ditambahkan, dalam hal ini ketahanan pangan di Kabupaten Lamonganpun harus terus dikuatkan. Namun, dalam pemberian alat-alat tersebut dari pemerintah kepada petani, tidak dibarengi dengan pelatihan penggunaan sehingga tidak semua bisa mengoperasikan alat-alat tersebut, dan seakan-akan alat-alat yang diberikan seperti dikomersialisasikan oleh pihak desa. Dalam hal ini pembuatan handtraktor harus menggunakan masyarakat yang ahli menggunakannya dan petani pun kembali mengeluarkan uang. Harapan dari masyarakat terkait dengan perkembangan sektor pertanian tentu menjadi harapan bersama termasuk juga instansi pemerintah yang bertugas untuk member layanan sehingga potensi dari wilayah yang ada

dapat dikembangkan dengan baik yang nantinya dapat menjadikan kesejahteraan bersama.

**TABEL I.3**  
**Produksi Tanaman Bahan**  
**Makanan (Padi) Kecamatan Glagah**

NO	NAMA DESA	PADI (GKD)
1	Kentong	1.091.9
2	Wangen	456.9
3	Bangkok	-
4	Meluntur	427.1
5	Dukuh Tunggal	993.0
6	Bapuh Bandung	1.021.0
7	TanggungPrigel	679.7
8	Sundangan	856.0
9	Karangagung	631.8
10	Duduklor	909.9
11	Medang	939.8
12	Mendogo	913.9
13	Began	450.9
14	Menganti	996.7
15	Rayung Gumuk	1.070.1
16	Gempol Pendowo	533.5
17	Soko	226.1
18	Morocalan	553.5
19	Pasi	1.113.8
20	Margoanyar	1.112.2
21	Glagah	1.310.4
22	Bapuhbaru	817.0
23	Jatirenggo	1.342.0
24	Konang	260.5
25	Wonorejo	297.9
26	Panggang	945.0
27	Wedoro	457.0
28	Karangturi	1.086.4
29	Meluwur	694.7
<b>Kecamatan Glagah</b>		<b>22.188.54</b>

**Tahun 2014 (TON)**

Sumber : Lihat Statistik Daerah Kecamatan Glagah 2015

Ada beberapa produksi tanaman bahan makanan yang dihasilkan diantaranya adalah

horticultura dan pertanian padi. Namun, pertanian padi menjadi salah satu produk unggulan.

## **Kerangka Pemikiran Teoritik**

### **Ekonomi Kerakyatan**

Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut Mubyarto dkk (2014), yaitu suatu sistem ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

### **Tujuan Ekonomi Kerakyatan**

Ada tujuh elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dkk (2014):

- Pertama, Negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki.
- Kedua, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran.
- Ketiga, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi.
- Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Kelima, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas kepemilikan atau perusahaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah.
- Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan

desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan

- dan peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan desa dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa. Anggaran desa dapat melebihi Rp 1 miliar per tahun sesuai kebutuhan.
- Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM).

### **Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat**

Ketepatan dalam menentukan indikator efektivitas tentu berdampak pada ketepatan analisis dari peneliti terhadap program yang sedang diteliti. Indikator menurut Ripley dalam Erwan dan Dyah (2012), adalah sebagai berikut:

1. Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.
2. Cakupan (*coverage*) digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau.
3. Frekuensi digunakan untuk menilai seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.
4. Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat.
5. Ketepatan Layanan (*service delivery*) digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu apa tidak.
6. Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas.
7. Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Indikator menurut Ripley mengarah pada tahap pelaksanaan atau implementasi dari program dengan mengutamakan ketepatan pelaksanaan, dalam hal ini program dapat dikatakan efektif apabila tujuh indikator tersebut berjalan dengan baik.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Efektivitas Implementasi yakni melihat seberapa efektif program telah dilaksanakan. Lokasi penelitian di Dinas Pertanian dan Kehutanan, BAPPEDA Lamongan, UPTD Kecamatan Glagah dan Kelompok Masyarakat Petani di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan berkembang menjadi *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan dan data online. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi penarikan dan kesimpulan serta teknik keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi.

Ketepatan Dalam menentukan metodologi penelitian akan berpengaruh pada hasil dari penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pelaksanaan Pengembangan Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat

Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dengan diadakannya program unggulan Bupati Lamongan terkait dengan pengembangan usaha pedesaan dengan nama program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) tentu merupakan terobosan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan terutamanya mereka yang mempunyai usaha dalam hal ini salah satunya adalah pertanian padi. Dengan mayoritas penduduk yang bertani tentunya program-program semacam ini sangat diharapkan oleh petani supaya berkembang dengan saling gotong-royong dari semua elemen yang berkepentingan di dalamnya, bukan tidak mungkin lagi saat program ini dirasakan sukses

maka tujuan ketahanan pangan bisa tercapai dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat terlebih apabila Kabupaten Lamongan bisa menutupi kekurangan pangan yang selama ini Indonesia masih bergantung dari Negara lain dalam kecukupan ketahanan pangan, sehingga harga yang tidak bisa ditentukan oleh pemerintah menjadikan harga pasaran naik-turun tidak pasti dan tentu merugikan masyarakat sendiri.

Menurut Serageldin (1993) keberlanjutan aspek ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan modal (*capital maintenance*), dan efisiensi penggunaan sumberdaya dan modal. Keberlanjutan ekologi meliputi kesatuan (*integrity*) ekosistem, daya dukung, perlindungan keanekaragaman jenis dan sumberdaya alam. Sedangkan keberlanjutan aspek sosial adalah adanya keadilan (*equity*), pemberdayaan (*empowerment*), partisipasi dan kelembagaan. Selanjutnya implementasi pembangunan berkelanjutan yang pertama kali harus diperhatikan adalah aspek sosial, karena berperan sebagai pusat dari pembangunan.

#### Kemudahan Akses Informasi dan Bantuan

Pemberian informasi atau penyuluhan terkait program GEMERLAP seharusnya memperhatikan sebuah keinginan yang diharapkan oleh petani, dengan mempelajari permasalahan yang ada di lapangan, saat pemerintah atau dinas terkait sudah mengerti permasalahan dan kemudian memberikan informasi atau penyuluhan semenarik mungkin dan terobosan-terobosan yang bisa lebih mengembangkan petani dapat member dampak yang bagus bagi para masyarakat petani di pedesaan. Namun berjalannya pemberian informasi yang tidak sesuai dan hanya dilakukan dengan tempo waktu yang tidak menentu dan tidak terjadwal membuat penyuluhan kepada masyarakat petani kurang maksimal.

Kemudahan akses menurut Mulyono (2015) dalam informasi kemudahan akses dapat diartikan sebagai bentuk pemberian informasi mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam program, adanya interaksi yang sering dilakukan dapat tercetusnya agenda atau ketenangan dari

semua yang terkait di dalam program. Pentingnya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap segala urusan yang dilakukan aparatur oleh menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan organisasi tersebut. Dalam hal ini aparatur harus berperan secara profesional dalam melaksanakan tugas, selain itu aparatur sangat penting memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sasaran sehingga sasaran dapat mengetahui lebih dalam apa yang belum diketahuinya.

### **Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan**

Perencanaan suatu program akan melihat permasalahan yang muncul dan kemudian perancangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan melihat salah satunya adalah kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga dalam upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) merupakan program unggulan yang tujuannya adalah meningkatkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal ini salah satunya adalah masyarakat petani. Dalam menentukan kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi tentunya pihak terkait yaitu pemerintah melakukan kajian mendalam dari akar sebuah masalah, tidak hanya menggunakan *sample* saat menentukan penyelesaian masalah tetapi lebih kepada turun langsung menjangkau aspirasi masyarakat sehingga dapat tertampung secara keseluruhan. Karena dalam suatu masalah masyarakat yang terlibat yaitu petani lebih memahami karakteristik dari suatu permasalahan yang dihadapi.

Kesesuaian kebutuhan menurut Ripley dalam Erwan dan Dyah (2012) Kesesuaian program dengan kebutuhan ini digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

### **Tingkat Intensitas Ketepatan Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Program**

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) hal ini bertujuan supaya para petani bisa lebih mengoptimalkan potensi diri masyarakat petani masing-masing yang tentu bisa menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam pertanian. Karena pertanian merupakan lapangan kerja yang masih menjadi pilihan utama masyarakat pedesaan di Kabupaten Lamongan.

Pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani, dalam pengelolaan seluruhnya diberikan kepada kelompok tani, sehingga baik buruknya keadaan dari bantuan alat yang diberikan semuanya dikembalikan kepada kelompok tani. kelompok tani bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan barang, pemerintah hanya melakukan pengontrolan untuk melihat bagaimana keadaan bantuan alat yang sudah diberikan kepada masyarakat petani yang dikelola oleh kelompok tani.

Pengelolaan barang bantuan lebih sering dipakai pada waktu pergantian musim, setelah selesainya musim padi maka perlunya pembajakan sawah dengan menggunakan traktor tersebut. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan pembajakan yang bersifat pesanan pemilik sawah ke kelompok tani, dalam hal ini kesulitan atau kekurangannya operator traktor menjadikan tidak semua keinginan masyarakat petani untuk membajak sawah terpenuhi, hanya beberapa orang yang bisa menjalankan menjadikan permasalahan semakin rumit, hal ini tentu harus disikapi dengan baik, karena tujuan di berikannya bantuan traktor merupakan upaya untuk lebih memudahkan petani dalam pembajakan sawah.

Ketepatan dalam melakukan pengelolaan merupakan tanggung jawab seluruh *stakeholder* terkait, walaupun saat telah diberikan atau disalurkan bantuan ke para kelompok tani, namun dalam seluruh berjalannya program masih merupakan tanggung jawab bersama. Masih adanya sistem pengelolaan yang mengalami kendala harus diselesaikan bersama-sama karena dalam pelaksanaan yang bermasalah apabila tidak segera di tindak lanjuti akan mengakibatkan

ketidak sesuaian implementasi dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam pengembangan pertanian melalui program GEMERLAP.

Menurut H. Combs dan Manzoor Ahmed (1985:41-174), tipologi pengembangan masyarakat ada empat model pendekatan, yaitu model: pendekatan penyuluhan; pendekatan pelatihan; pendekatan koperasi swadaya; dan pendekatan pembangunan terpadu. Adanya empat model tipologi tentu merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan untuk dapat mengembangkan masyarakat, bertujuan supaya masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman yang mulai berkembang luas.

### **Pemantauan atau *Monitoring***

Dalam segi pemantauan tidak terjadwal dan tidak pasti kapan adanya, hal ini tentu menyulitkan untuk dilakukannya evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan program GEMERLAP atau permasalahan yang menghambat kemajuan dari suatu program. Dalam perjalanan suatu program apabila sudah direncanakan sebaik-baiknya tetapi tidak dikontrol perkembangannya menjadikan ada hal yang dilupakan yang bisa menggagalkan tingkat kesuksesan dari program. Apalagi pemantauan merupakan bahan yang *valid* untuk dijadikan evaluasi. Dengan pemantauan yang jarang dilakukan tentu akan berdampak pada evaluasi, evaluasi akan terlihat sia-sia apabila hambatan dan permasalahan tidak didapatkan secara rinci. Ketidak tepatan dalam perencanaan pemantauan dengan hanya mengandalkan ketika lewat pedesaan tersebut tentu menjadi hambatan dalam tubuh instansi pemerintahan, karena masyarakat tentu mengharapkan pemecahan masalah yang masih belum bisa dihadapi oleh masyarakat kelompok tani dengan diharapannya dibantu oleh petugas pemerintah.

Sementara itu dengan materi yang pada hakekatnya tidak berbeda, Winardi (Sujamto, 1994:96) menggambarkan proses pemantauan ini dalam 4 (empat) langkah, yakni: (a)Menetapkan dasar atau standar untuk pemantauan. (b)Meneliti hasil yang dicapai. (c)Membandingkan pelaksanaan dengan standart

dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan). (d)Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Titik awal dari rangkaian proses pemantauan adalah menentukan standar pemantauan. Standar untuk pemantauan adalah suatu standar atau tolok ukur yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak. Dilihat dari standar ini hasil pemantauan hanya mempunyai dua kemungkinan yaitu berjalan sesuai dengan standar ataukah menyimpang (Sujamto, 1986:97).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan penelitian tentang Efektivitas Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis pedesaan (GEMERLAP) di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan terkait dengan pertanian masyarakat pedesaan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan pertanian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan memang telah dijalankan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Lamongan masih belum bisa menjalankan secara maksimal sehingga menjadikan suatu program yang telah direncanakan masih belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Masih kurangnya koordinasi antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, UPTD Kecamatan Glagah dan masyarakat anggota pertanian.
2. Pengembangan pertanian melalui program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) masih jauh dari harapan masyarakat petani. Masih tidak naiknya angka produktivitas panen padi di Desa Soko yang di pengaruhi beberapa faktor. Bahkan produksi padi di Desa Soko adalah terndah di Kecamatan Glagah. Terdapat 6 (Enam) indikator yang digunakan sebagai bentuk penilaian pelaksanaan suatu program

menyatakan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan program GEMERLAP, antara lain :

- A. Kesesuaian Kebutuhan : Dengan menggunakan alur koordinasi mulai dari masyarakat petani, UPTD hingga Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dengan memberikan bantuan berupa satu macam alat traktor yang berjumlah 2 (dua) unit dan pompa 3 (tiga) unit, dirasa tidak efektif, pemberian bantuan yang diharapkan masyarakat petani yaitu bermacamnya bantuan sehingga dalam penggunaan masyarakat petani benar-benar dimudahkan. Melihat dari permasalahan yang muncul di masyarakat dengan masih banyaknya kegagalan panen akibat musim yang tidak menentu diantaranya banjir dan kekeringan menjadi permasalahan yang mendasar, minimnya ketersediaan pupuk sehingga masih banyaknya padi yang terkena hama dan pertumbuhan padi yang tidak maksimal.
- B. Akses Informasi dan Kemudahan Penggunaan Sarana : Ketidak jelasan pemberian informasi terkait dengan pengembangan pertanian oleh pemerintah atau Dinas terkait menunjukkan bahwa tidak adanya agenda yang disusun secara rinci. Sehingga, masyarakat petani kebingungan untuk mendapatkan informasi dan bahkan tidak mau menghadiri penyuluhan terkait informasi dari pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan. Selain itu, ketidak tepatan pemberian informasi dengan permasalahan yang ada di Desa Soko. Tentunya hal semacam ini membuat tidak efektifnya suatu program dari pemerintah. Penggunaan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah ke setiap kelompok tani masih kurang maksimal, Operator traktor yang terkadang tidak mau untuk membajak sawah menjadi salah satu masalah yang patut dievaluasi. Kurang adanya

pemberdayaan untuk pemakaian alat traktor dan hanya menggantungkan kepada salah satu masyarakat kelompok tani untuk mengoperasikan.

- C. Ketepatan Pembinaan dan Pengelolaan : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu harus melakukan suatu koordinasi antar *stakeholder* terkait dan dilakukannya pembinaan merupakan salah satu bentuk upaya. Namun, dalam program GEMERLAP terjadi perbedaan pendapat informan yaitu pihak Dinas menyatakan adanya pembinaan, tetapi di ketua kelompok tani Desa Soko mengatakan tidak adanya pembinaan yang dilakukan. Tentu hal ini menjadikan program terlihat adanya kesenjangan antara petani dan pemerintah terkait. Sedangkan pengelolaan hanya diserahkan kepada kelompok tani dan pihak Dinas terkait hanya melakukan pemantauan. Pelaksanaan tahapan dengan proses dalam pelaksanaan pemantauan program masih menjadi penghambat, dikarenakan tidak ada penjadwalan yang pasti mengenai waktu pemantauan terkait program GEMERLAP. Kemudian tahapan pelaksanaan terkait pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelompok tani, menjadikan masyarakat enggan datang untuk menghadiri sosialisasi.
- D. Pemantauan atau *Monitoring* : Untuk melihat hasil pelaksanaan tentu perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Namun, nyatanya pemantauan hanya dilakukan saat pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui UPTD Pertanian Kecamatan melakukan pemantauan hanya saat ada waktu yang longgar dan memperlihatkan ketidak jelasan jadwal *monitoring*.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil dari kesimpulan, masih banyaknya hal-hal negatif dan sedikit hal positif yang

mempengaruhi tujuan pertanian di Desa Soko sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP). Ada beberapa saran yang diberikan peneliti untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan terkait penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan perlu melakukan pendekatan secara personal kepada setiap masyarakat petani dengan lebih banyak mendengarkan keluh dan kesah petani secara menyeluruh terlebih dahulu penting dilakukan untuk menjalin kedekatan secara *emotional* sehingga dalam pelaksanaan program tidak terkesan *disintegrasi*. Perlunya penjadwalan dan intensitas bertemu masyarakat harus lebih diperbanyak.
2. Perlunya penjadwalan ulang dengan intensitas yang ditambahkan terkait dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) dalam sektor pertanian.
3. Pentingnya penekanan terhadap evaluasi kinerja pegawai secara keseluruhan yang terkait dalam pelaksanaan program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) dalam sektor pertanian, sehingga masih sering adanya disintegrasi diantara pelaksana bisa teratasi dan lebih bersinergi.
4. Perlu kembali dilakukan pengkajian ulang program dengan lebih melihat tingkat efisiensi dan efektifitas pemberian

bantuan, Efisien dan efektif pada pembinaan dan pengolahan produk bantuan untuk pertanian terkait inovasi sehingga tingkat produktivitas panen padi bisa meningkat.

5. Dalam pemberian bantuan harus melihat dari sisi kebutuhan dari kelompok tani, karena kebutuhan yang lebih mengetahui dalam adalah kelompok tani yang merasakan permasalahan atau kecenderungan adanya ketakutan. Sehingga masalah atau ketakutan para petani padi bisa teratasi.

#### Daftar Pustaka

- Erwan dan Dyah, 2012, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta.
- Mubyarto, dkk. 2014, *Ekonomi Kerakyatan (Cetakan Pertama)*, Lembaga Suluh Nusantara dan *American Institute For Indonesia Studies (AIFIS)*, Jakarta.
- Mulyono, Arif. 2015, *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah*, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Serageldin, I. 1993. Promoting Sustainable Development to World. New Paradigment Enfollowing the Environmental Proceeding of the First Annual and International Conference and Environmentally SustainableDevelopment.
- Sujamto. (1986). Beberapa Pengantar Dibidang Pengawasan. Jakarta: Graha Indonesia.
- Combs, Philip H., dan Manzoor Ahmed. 1985. Memerangi Kemiskinan di Pedesaan melalui Pendidikan Non -Formal. Jakarta: CV Rajawali.